

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KENDALI MUTU PROGRAM PERTANAHAN (SKMPP) PADA SUB.BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

¹Gwyn Cyril Vertido Somera, ²Nurfiana

^{1,2}Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
Jl. ZA. Pagar Alam No.93, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 3514
(0721)787214

ABSTRACT

In the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency is one of the ministries engaged in land and there are regional offices and land offices in various regions in Indonesia. At the Regional Office of the National Branch Agency which is a place for internships / work of constituent practices using an application called the Land Program Quality Control System (SKMPP). This application is to recapitulate the latest data on May 28, 2021, the Performance Value of each Work Unit (Satker) and then compile a Satker Performance Value Comparison in the Regional Office of the National Land Agency of Lampung Province. From the existing explanation, it is expected that the application of the Land Program Quality Control System to be more easily understood and used by interns in order to do the work given properly and correctly and can be developed for the better.

Keywords—SKMPP, Satker, Regional Office of the National Land Agency

ABSTRAK

Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah salah satu kementerian yang bergerak di bidang pertanahan dan terdapat kantor wilayah dan kantor pertanahan di berbagai daerah di Indonesia. Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang menjadi tempat magang/kerja praktik penyusun menggunakan aplikasi yang bernama Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP). Aplikasi ini untuk merkapitulasi data terbaru pada 28 Mei 2021 Nilai Kinerja setiap Satuan Kerja (Satker) lalu menyusun Komparasi Nilai Kinerja Satker di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Dari penjelasan yang ada diharapkan agar aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh peserta magang agar bisa mengerjakan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan benar serta bisa dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

Kata Kunci—SKMPP, Satker, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

I. PENDAHULUAN

Aplikasi SKMPP adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan dalam rangka mengendalikan pelaksanaan Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang di dalam sistem informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional [2]. Petugas Operator SKMPP yang selanjutnya disebut Operator SKMPP adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas mengoperasikan Aplikasi SKMPP [2].

Peranan SKMPP antara lain, Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program-program ATR/ BPN agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Monitoring melalui SKMPP dilakukan terhadap seluruh program yang dilaksanakan oleh Pusat maupun Kanwil dan Kantor Pertanahan sesuai dengan kegiatan yang ada didalam DIPA masing-masing. Eksisting dalam aplikasi SKMPP sekarang terdapat 57 kegiatan/program berbasis Rupiah Murni yang dipantau dan dievaluasi. Selain data dan informasi mengenai program/kegiatan juga harus diisi untuk menjadi informasi yaitu data profil kantor dan laporan hambatan kendala dan masalah pelaksanaan program [1][3].

Pada pelaksanaan magang/kerja praktik diharuskan untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut agar dapat bisa membantu mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan yang ada di lapangan. Namun karena aplikasi ini hanya bisa diakses oleh petugas operator/pegawai yang ditunjuk untuk menjalankannya sehingga peserta magang kesulitan dalam mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka dalam jurnal yang berjudul Penggunaan Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) Pada Sub.Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara agar para peserta magang yang ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ini dapat bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan pelaksanaan magang ini terlaksana dengan lancar.

II. MASALAH

Identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai bahan pertimbangan penyusunan program individu maupun kelompok Kerja Peraktek (KP), antara lain:

1. Bagaimana cara penggunaan pada aplikasi ini?
2. Bagaimana cara memaksimalkan aplikasi ini agar bisa berguna untuk banyak hal di bidang ini?
3. Bagaimana cara mahasiswa agar dapat memahami cara pemakaian aplikasi tersebut?

III. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini dilakukan di Sub.Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung. Dengan durasi pelaksanaan magang/kerja praktek ini adalah selama 3 bulan lamanya.

Metode yang digunakan berupa studi kasus yang dilakukan di lapangan. Pengumpulan data yang saya dapatkan berasal dari Mentor lapangan serta karyawan yang bertugas di Sub.Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi

Lampung. Pada saat pemberian materi oleh mentor, mahasiswa dapat mencatat cara pengerjaan dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh mentor dan dapat mengimplementasikannya dengan maksimal saat terdapat tugas serupa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang, yang disebut juga SKMPP adalah sistem pengendalian internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang menjadi bagian integral dari sistem manajemen untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan dalam rangka mengendalikan pelaksanaan Program ATR/BPN agar berjalan sesuai dengan rencana, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

SKMPP menghasilkan data berupa informasi kinerja Program ATR/BPN dari Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. Tata kelola SKMPP, meliputi:

- a. Pengisian dan realisasi target fisik dan anggaran serta pelaporan pelaksanaan Program ATR/BPN;
- b. Pemutakhiran data;
- c. Pemantauan;
- d. Pengisian profil kantor;
- e. Pengelolaan aplikasi SKMPP; dan
- f. Pemanfaatan hasil SKMPP. [1]

Selama proses kegiatan magang/kerja praktik selama 3 bulan diharapkan dapat berdampak positif untuk Sub.Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Beberapa hasil yang didapat:

1. Penggunaan Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP)



Gambar 1. Antarmuka Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan

Pemakaian aplikasi ini untuk merekapitulasi data terbaru pada 28 Mei 2021 Nilai Kinerja setiap Satuan Kerja (Satker) lalu menyusun Komparasi Nilai Kinerja Satker di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Dengan menyusun Komparasi Nilai Kinerja maka, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dapat memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menilai suatu pekerjaan.[1]

2. Penyusunan Realisasi Anggaran DIPA Keadaan Sampai Januari dan Februari 2021 Kantor Pertanahan Lampung Tengah.

KODE	PROGRAM/KELOMPOK TUGAS DAN KEGIATAN/ANALISIS TUGAS	RENCANA DIPA		REALISASI	
		PLN	PLN	PLN	PLN
001.01.1.1.1	PROGRAM PENGALIHAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN	2.000.000.000	2.000.000.000	200.000.000	10,00
001.01.1.1.1.001	KELOMPOK TUGAS PERUMAHAN	187.400.000	187.400.000	187.400.000	100,00
001.01.1.1.1.001.001	PANGKAPAN PENGUMAHAN KAWASAN	167.400.000	167.400.000	167.400.000	100,00
001.01.1.1.1.001.001.001	Pembuatan Peta Tanah Pertanahan dan Ruang Daerah	187.400.000	187.400.000	187.400.000	100,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001	Pembuatan Peta Tanah Pertanahan dan Ruang	107.400.000	107.400.000	107.400.000	100,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001	PENGUMAHAN DAN PERUMAHAN KAWASAN	2.000.000.000	2.000.000.000	200.000.000	10,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001	PLN JAWABAN PERUMAHAN	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001	Layanan Pengalihan Sifat Tanah Luas Ruang dari 18 Ha (Kawati)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001.001	Layanan Pengalihan Sifat dan Fungsi Lahan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001	PANGKAPAN PERUMAHAN KAWASAN	2.000.000.000	2.000.000.000	200.000.000	10,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Layanan Pemukiman, Monitoring, Evaluasi dan Super-lot	5.570.000	5.570.000	5.570.000	100,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Layanan Penyertanagatan Tugan dan Fungsi Lahan	5.570.000	5.570.000	5.570.000	100,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Berita Acara Penyerahan Kategori A	520.770.000	520.770.000	49.800.000	9,57
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Pengalihan dan Peranahan Sifat Tanah	120.770.000	120.770.000	49.800.000	41,23
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	PET PTSL ADN Kategori A	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	50,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Pengalihan dan Peranahan Sifat Tanah	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	50,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	PET RA PTSL Kategori A	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Das Form Perumahan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	PERUMAHAN DAN PERUMAHAN KAWASAN, PENGUMAHAN DAN PERUMAHAN KAWASAN	2.000.000.000	2.000.000.000	200.000.000	10,00
001.01.1.1.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	PERUMAHAN DAN PERUMAHAN KAWASAN	2.000.000.000	2.000.000.000	200.000.000	10,00
001.01.1.1.1.001	Pengalihan DIPA Perumahan	11.700.000	11.700.000	11.700.000	100,00
001.01.1.1.1.001	Pengalihan DIPA Perumahan	11.700.000	11.700.000	11.700.000	100,00

Gambar 2. Realisasi Anggaran DIPA

Realisasi Anggaran Data Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yakni DIPA per-Satuan Kerja (Satker) yang dicetak secara otomatis melalui sistem dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker Kantor Pertanahan Lampung Tengah. Penyusun diberikan data Realisasi Anggaran DIPA Keadaan Sampai Januari dan Februari 2021 Kantor Pertanahan Lampung Tengah untuk dipelajari dan mengenal bagaimana anggaran-anggaran yang diterapkan Kantor Pertanahan [2].

3. Penyusunan Bahan Pelaksanaan Administrasi Kerjasama

Membantu menyiapkan dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bulan Februari 2021 dan mengarsipkan guna menjamin bahan pertanggungjawaban untuk kegiatan pemerintah. Dan penulis juga diminta untuk Membantu membuat surat Berita Acara Inventarisasi Tunggakan Pelayanan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.[3]

FASE DAN REALISASI PMP TAHUN ANGGARAN 2021
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KEADAAN SAMPAI DENGAN 30 MARET 2021

NO	URAIAN AKUN	VOLUME		RUANGKUP		%
		DIPA	REALISASI	DIPA	REALISASI	
1	TARGET PENBIMBANGAN	6.013 Layanan	- Layanan	1.626.178.000	-	0,00%
2	PAJU BELANJA					
a.	Survei dan Pemetaan Tematik	2.000 Layanan	- Layanan	107.436.000	-	0,00%
	536113 Belanja Modal Bahan Baku Aspek Tetap Lainnya/Asst Lainnya			17.794.000	-	0,00%
	536117 Belanja Modal Perjalanan Asst Tetap Lainnya/Asst Lainnya			89.642.000	-	0,00%
b.	Pengukuran dan Pemetaan Katalinral	3.000 Layanan	- Layanan	409.816.000	-	0,00%
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			204.700.000	-	0,00%
	521211 Belanja Bahan			31.225.000	-	0,00%
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			170.637.000	-	0,00%
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2.248.000	-	0,00%
c.	Pengaturan Tanah Komunal, Rukungan Kefembagaan dan PPKT	15 Layanan	- Layanan	11.753.000	-	0,00%
	521211 Belanja Bahan			1.029.000	-	0,00%
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			2.874.000	-	0,00%
	522151 Belanja Jasa Profesi			3.300.000	-	0,00%
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4.550.000	-	0,00%
d.	Penetapan Hak Tanah dan Ruang	1.000 Layanan	- Layanan	307.672.000	-	0,00%
	521211 Belanja Bahan			7.128.000	-	0,00%
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			70.483.000	-	0,00%
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			56.086.000	-	0,00%
	521219 Belanja Honor Output Kegiatan			165.000.000	-	0,00%

Gambar 3. Pagu dan Realisasi PNPB Tahun Anggaran 2021

4. Penyusunan Komparasi Nilai Kinerja Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Lampung

Rekapitulasi data terbaru pada 28 Mei 2021 Nilai Kinerja setiap Satuan Kerja (Satker) lalu menyusun Komparasi Nilai Kinerja Satker di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Dengan menyusun Komparasi Nilai Kinerja maka, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dapat memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menilai suatu pekerjaan. [1]



Gambar 4. Rekapitulasi Nilai Kinerja Satker

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun selama melaksanakan Magang di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dengan data-data yang ada, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Mendapatkan pengalaman bagaimana terjun langsung dalam dunia kerja dalam kegiatan Magang ini dan belajar bersosialisasi dengan para staff.
2. Dapat melatih belajar rasa disiplin dan rasa tanggung jawab dalam bekerja dan penyusun pun belajar untuk bekerja dalam tim ataupun mandiri untuk melaksanakan pekerjaan hingga selesai.
3. Melakukan pengecekan nilai kinerja pada setiap satuan kerja yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, kemudian dijadikan satu file dan disampaikan kepada staff yang bersangkutan.
4. Dapat melakukan penyusunan dan rekapitulasi anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode Januari, Februari, dan Juli dengan data yang diberikan oleh salah satu staff SubBag. Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Data yang diambil, didapatkan dari aplikasi sistem pada aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) yang di sediakan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
5. Dapat memahami dan membantu mengerjakan sebagian tugas dan fungsi Sub.Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) yang dalam pelaksanaannya memerlukan data, koordinasi, serata analisisnya.

SARAN

Dari hasil selama saya melakukan kegiatan Magang Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan baik kedepannya saya berharap :

1. Mentor dan para staff yang bertugas agar tidak perlu sungkan memberikan tugas kepada para peserta magang dan kepada peserta magang yang akan datang, dan dapat memberikan kepercayaan kepada peserta magang untuk membantu pekerjaan. Dan para peserta magang diberikan tugas sesuai dengan program keahlian yang dimilikinya, biarpun berbeda tetapi masih ada kaitannya dengan jurusan.
2. Waktu magang ditambahkan lagi, agar para peserta magang bisa lebih banyak mempelajari dan merasakan dunia pekerjaan yang lebih nyata.
3. Agar pada aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh peserta magang agar bisa mengerjakan pekerjaan yang

diberikan dengan baik dan benar serta bisa dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

4. Agar dapat menciptakan aplikasi kearsipan data agar lebih mudah dan tertata lagi dalam penyimpanan dan pencarian di kemudian hari oleh para staff yang bertugas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. atrbpn.go.id.
<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=ExQV517GP8W7CozUAzLbfasZVWf0lAJdXXthKrvpGjiC8Mf4BHi0N9wDzoZ/ngbb>. Desember 01, 2020
- [2] M. Agraria, D. A. N. Tata, K. Badan, P. Nasional, K. Badan, and P. Nasional, “Menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional,” pp. 2015–2016, 2018.
- [3] T. Rachman, “Pedoman Perencanaan Program dan Anggaran, Kerjasama, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan tahun 2020,” *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952., pp. 10–27, 2018.